KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENIRUAN TEKNOLOGI ALUTSISTA UDARA OLEH TIONGKOK PADA MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN DONALD TRUMP

Oleh : Arina Nihayati
Pembimbing : Dr. Yessi Olivia, S.IP, M.Int.Rel
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas
Km.12,5 Simp.Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 07561-63277

Abstract

This research analyses the United States (US) foreign policy on dealing with cyber threats coming from China. These threats include state-sponsored intellectual theft, cyber espionage and evasion of export control laws. President Barack Obama struck a deal on intellectual aircraft theft with Xi Jinping but the deal was not effectively implemented. Under the administration of Donald Trump, the US rescinds the Obama's administration strategy and replaces it with the National Security Presidential Memorandum 13 (NSPM-13).

This research uses the perspective of neo-realism which focuses on the impact of the anarchic international on states behavior. It applies the rational actor model in the formulation of foreign policies. This research relies on data collected from books, journals, and websites.

This study shows that the decision to release Presidential Memorandum 13 was based on the calculation that China threatening America defense and economy. NSPM 13 demonstrates to strengthening America's cybersecurity capabilities and securing America from cyber threats. This policy was in line with Donald Trump's America First doctrine where it sees the world through the lens of realism of a zero sum relationship.

Keywords: America First, China Threat, Air Vehicle, Cyber Threat, Cyber Espionage, US Cyber Policy, NSPM-13

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada tahun 2012 Tiongkok tertangkap meniru persenjataan militer Amerika Serikat yang dilakukan dengan meretas dan mencuri data rahasia menggunakan siber. Peretasan data penelitian senjata merupakan hal yang sangat serius, pasalnya persenjataan suatu negara merupakan hal yang rahasia dan sentimental untuk di paparkan ke pihak lain. Pada tahun 2015 Obama dan Xi Jinping telah melakukan perjanjian untuk tidak mendukung pencurian senjata. Namun, penindakan pada masa Obama tidak efektif dikarenakan Tiongkok menggunakan intelijen untuk masuk ke operator akademik dan institusi-institusi internal pemerintah Amerika Serikat, profil palsu media sosial dan linkedin palsu.[1]

Pada paruh pertama 2017 tren ini berlanjut dengan akuisisi menyumbang 97,6 persen dari investasi Tiongkok di Amerika Serikat. Faktor-faktor inilah yang menjadi faktor tidak efektifnya penanganan peretasan data yang berujung pada peniruan persenjataan militer dan pencurian data-data rahasia Amerika Serikat.[2]

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat berubah di era Trump. Trump menyuarakan kebijakan *America First* di masa jabatannya. *America First* merujuk kepada pendirian kebijakan luar negeri yang umumnya terkait *American Nationalism, Unilateralism, Protectionism, and Isolationism*.[3] Dalam kebijakan NSPM 13 memiliki kaitan dengan kebijakan Unilateralisme Amerika Serikat yaitu doktrin yang mendukung tindakan sepihak. Visi *America First* pada era pemerintahan Trump di dunia dengan kepentingan independen Amerika Serikat, kebijakan luar negeri ini mengusung pemerintah Amerika Serikat akan mengurus negara terlebih dahulu sebelum ikut khawatir dengan problematika negara lain di dunia.[4] Dengan adanya kebijakan baru di bawah Trump membuat Amerika Serikat mengambil sikap yang berbeda dari pemerintahan sebelumnya dalam menyikapi peretasan teknologi militer.

Respon Trump dengan kebijakan luar negeri *America First* dalam menyikapi tindakan peretasan data dan peniruan senjata oleh Tiongkok. Kemudian hal ini menghasilkan kebijakan luar negeri Trump yaitu kebijakan NSPM 13 *(National Security Presidential Memoranda)*. Memoranda tersebut memberikan wewenang tunggal kepada Trump untuk bertindak sebagai *Commander in Chief* dalam menyetujui penggunaan senjata siber.

1.2 Rumusan Masalah

"Bagaimana kebijakan Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Donald Trump, merespon tindakan peniruan teknologi senjata yang dilakukan Tiongkok dalam bidang Alutsista Udara?"

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan Amerika Serikat terhadap peniruan teknologi senjata pada pemerintahan Donald Trump dalam pengamanan siber.

[1] FORUM's Staff, "Mencuri Keunggulan Pencurian Kekayaan Intellektual oleh Tiongkok Merongrong Kepercayaaan," *FORUM Indo Asia-Pasific Defense Journal* no 44, (2019), 18.

[2] Ibid.

[3] Robert Kagan, "America First Has Won", diakses 25 April 2020, https://www.nytimes.com/2018/09/23/opinion/trump-foreign-policy-america-first.html.

[4] Paul Macdonald, "American First? Explaining Continuity and Change in Trump Foreign Policy", *Political Science Quarterly*, 400.

2. Untuk mengetahui peniruan teknologi senjata militer yang dilakukan oleh Tiongkok dalam bidang Alutsista Udara.

Dan Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi yang berguna dan bermanfaat dalam memperluas dunia ilmu pengetahuan dan menjadi sumber informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.

1.4 Prespektif dan Teori

Perspektif yang digunakan kasus ini adalah neo-realisme. Konsep sistem internasional yang anarki yang dibawakan oleh Kenneth Waltz relevan dengan penelitian ini. Waltz mengungkapkan asumsi dasar neo-realis yaitu sifat anarkis sistem internasional telah menjadi prinsip tatanan dalam beberapa abad. Karakter unit-unit dalam sistem identik karena tekanan struktur internasional. Dalam pertarungan posisi dan kekuasaan di bawah kondisi struktur sistem internasional yang anarkis.[5]

Pendekatan utama neo-realisme pada kesiapan dan penangkalan militer dalam pandangan dunia yang pesimistik simetris dengan kasus peretasan data untuk kepentingan militer yang dilakukan Tiongkok terhadap Amerika Serikat. Motif kekuasaan dan keuntungan (perolehan relatif) dibandingkan dengan negara lain selaras dengan konsep inti neo-realisme dalam pandangannya terkait perlombaan senjata.[6]

Teori yang dipakai pada tulisan ini adalah teori kebijakan luar negeri. Menurut James N Rosenau bahwa kebijakan luar negeri dibuat oleh suatu negara yang bertujuan untuk memperoleh kontrol terhadap aktor internasional di luar kedaulatan mereka.[7] Salah satu teori tentang perumusan kebijakan luar negeri adalah model aktor rasional *(rational actor model)*. Konsep model rasional aktor dalam mengambil kebijakan luar negeri merupakan hasil dari proses intelektual. Analisis kebijakan rasional aktor ini adalah pilihan-pilihan dari keputusan pemerintah dengan telah ditelaah dan dikaji akan untung-rugi dari keputusan tersebut.[8]

1.4.1. Level Analisa

Tingkat analisis yang dipakai adalah negara-bangsa. Tingkat analisis ini mempelajari proses pembuatan keputusan tentang hubungan internasional, yaitu politik luar negeri oleh suatu negara-bangsa yang utuh. Perbedaan-perbedaan diantara berbagai negara lebih ditekankan demikian juga pengaruh negara-bangsa terhadap sistem internasional.[9] Penulis menggunakan tingkat analisa negara bangsa untuk menjelaskan perilaku negara-bangsa di arena internasional terutama dengan menelaah kondisi-kondisi dalam negeri yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dan keputusan.

1.5 Asumsi Dasar

Asumsi penelitian bahwa kebijakan luar negeri yang diambil oleh Trump mencakup langkah-langkah untuk memproteksi keamanan teknologi senjata Amerika Serikat. Berdasarkan rumusan masalah dan mengacu pada kerangka teori yang penulis ajukan, penulis menemukan bahwa **pemerintah AS di bawah Trump merumuskan NSPM 13 untuk mempersempit ruang mata-mata intelektual mencuri data rahasia.** Kebijakan Trump dengan *America First* nya bertujuan untuk mempersempit ruang mata-mata intelektual mencuri data rahasia. Kebijakan yang dipilih Trump berjenis

[5] Burchill & Linklater, Op.Cit, 115.
[6] Asrudin dkk, *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 67.
[7] Ibid, 70.
[8] Laura Neack, *The New Foreign Policy, Power Seeking in Globalized Era (*America: Rowman and Littlefield Publisher, 2008*)* 31.
[9] Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi* , (Jakarta: LP3ES, 1990) 48.

Memoranda dikarenakan Memoranda tidak harus di serahkan kepada *Federal Register* sehingga lebih sulit untuk di identifikasi.

1.6. Definisi Konsepsional

Peniruan teknologi senjata adalah peniruan teknologi dengan cara mencontoh data, penemuan, ciptaan ilmu, teknologi dan pemakaian simbol atau lambang dari pembuat produk aslinya. Dalam *Intellectual Property Rights* (IPR) peniruan teknologi senjata masuk ke dalam cakupan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Industri bagian desain produk (*industrial design*).[10]

China Threat adalah perdebatan tentang apakah peningkatan kekuatan Tiongkok adalah ancaman atau tidak.[11]

America First adalah visi politik internasional pada era pemerintahan Trump di dunia dengan kepentingan independen, kebijakan luar negeri ini mengusung pemerintah Amerika Serikat akan mengurus negara terlebih dahulu sebelum ikut khawatir dengan problematika negara lain di dunia.[12]

Ancaman siber merupakan fenomena baru dari kejahatan internasional. David Wall[13] mengkategorikan keamanan siber menjadi empat substansi yaitu *Cyber, Cyber-deceptions and thefts*, *Cyber-pornography*, *Cyber-violance*.[14] Hal ini relevan dengan pernyataan David Wall mengenai kejahatan siber point ke 2 yaitu c*yber-deceptions and thefts*. Yang merupakan tindakan pencurian data dengan cara meretas sistem siber.

NSPM 13 (National Security Presidential Memoranda) adalah Memoranda yang bertujuan untuk mempersempit ruang mata-mata intelektual mencuri data rahasia. Memoranda lebih dipilih daripada jenis kebijakan presiden sebagai *chief of executive* dan tidak harus di serahkan kepada *Federal Register* sehingga lebih sulit untuk di identifikasi. Memoranda melewati Kongres Amerika Serikat, namun kebijakan memoranda tidak harus ada asal induk kebijakan.[15]

1.7 Definisi Operasional

Amerika Serikat merupakan negara yang ditiru teknologi senjata dengan pencurian data secara massif oleh Tiongkok. Problematika ini menghasilkan kesepakatan pada masa pemerintahan Obama meski tidak efektif dikarenakan factor-faktor internal dan eksternal. Sehingga penulis ingin mencari kebijakan luar negeri *America First* pemerintahan Trump atas responnya pada kasus ini.

Trump merespon dengan menggunakan kebijakan luar negeri, teori yang digunakan pembuatan kebijakan luar negeri model aktor rasional. Proses menentukan kebijakan adalah dengan memilih pilihan yang paling prioritas diantara yang lain. Kemudian mengidentifikasi, menganalisis opsi yang tersedia dan kemungkinan konsekuensi yang didapat. Dengan adanya asumsi tersebut, pembuat keputusan menghitung nilai yang diharapkan dari setiap alternatif yang memaksimalkan *benefit* dan meminimalkan *cost*.[16] Pertimbangan-pertimbangan datang melalui lingkungan aktor rasional bahkan dari lawan. Sehingga aktor rasional akan selalu menimbang *cost-benefit* yang di dapatkannya sebelum keputusan akhir disahkan. Pertimbangan-pertimbangan pemerintahan Trump menimbang *cost-benefit* dari kebijakan sebelumnya yang kurang efektif sebelum keputusan akhir yaitu NSPM 13 disahkan.

1.8. Metodologi Penelitian

[10] WIPO (World Intellectual Property Organization) Publication, *What is Intellectual Property?*, Switzerland (2018), 14.

[11] Sayre, Wallace. *American Government*. New York: Barners Publisher, (1966)

[12] Paul Macdonald, Op.Cit, 400.

[13] The Chiefs of Staff Ministry of Defense, *Cyber Primer The Cyber Primer (2nd Edition) Development, Concepts and Doctrine Centre,* Laporan Tahunan (Juli 2016), 12.

[14] Majid Yar, "The Novelty of 'Cybercrime' An Assessment in Light of Routine Activity Theory," *European Journal of Criminology* no 1 (2005), 410.

[15] Wallace Sayre, Op.Cit, 45

[16] Ibid

Dalam penyusunan penulis menggunakan metode kualitatif, melalui studi pustaka dan data bahan sekunder. Analisis data secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori sebagai pemandu analisis masalah. Landasan teori juga digunakan sebagai latar belakang dan fokus penelitian dari perspektif mana masalah ini akan dilihat. Metode ini juga untuk mengelaborasikan dengan cara deskriptif terkait masalah dengan gambaran sesuai dengan permasalahan di lapangan.

Dalam penyusunan penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, pengkajian buku, jurnal, surat kabar dan media internet serta referensi lainnya. Kemudian data yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis dan dikomparasikan dengan informasi, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

II.HUBUNGAN AMERIKA SERIKAT DAN TIOGKOK

2.1 Politik Amerika Serikat dan Tiongkok

Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini memiliki perbedaan dalam sistem politik. Sejak Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776, Amerika Serikat telah memilih demokrasi sebagai pondasi yang kuat. Thomas Jefferson menyatakan bahwa demokrasi telah senantiasa ada dalam kehidupan pada imigran Amerika Serikat. Demokrasi menjadi pondasi fundamental dalam mengatur moral dan nilai-nilai individu di masyarakat Amerika Serikat.[17]

Pada Oktober 1949, pemimpin Partai Komunis Tiongkok Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di Beijing pada 1 Oktober setelah Komunis yang didukung petani mengalahkan pemerintah Nasionalis Chiang Kai-shek. Chiang dan ribuan pasukannya melarikan diri ke Taiwan.[18]

2.2. Dinamika Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok

Pasca kemenangan komunis Tiongkok pada 1949, Kepala Kantor Komunis Tiongkok membahas hubungan Amerika Serikat dan rezim baru Tiongkok. Pada awal 1945 komunis Tiongkok melihat bahwa Amerika Serikat lebih dekat ke nasionalis Tiongkok dan menghentikan kerjasama terhadap pergerakan komunis Tiongkok.[19]

Normalisasi hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok dimulai pada April 1971 saat tim ping-pong Tiongkok mengundang anggota tim Amerika Serikat ke Tiongkok. Jurnalis yang menyertai para pemain AS termasuk di antara orang Amerika pertama yang diizinkan memasuki Tiongkok sejak 1949. Fase selanjutnya Presiden Richard Nixon menghabiskan delapan hari di Tiongkok pada Februari 1972, di mana ia bertemu Ketua Mao Zedong dan menandatangani *Shanghai Communique* dengan Perdana Menteri Zhou Enlai.[20]

2.3. 'Ancaman Tiongkok' (China Threat) Terhadap Hubungan Tiongkok dan Amerika Serikat

Tiongkok menjalankan perang politik dalam menjalankan target 2049. Menurut Mark Stokes dan Russel Hsio dari Project 2049 institut, perang politik adalah perilaku dan usaha untuk mempengaruhi motif, alasan objektif, pemerintahan,organisasi, kelompok bahkan individu bertujuan mendukung tujuan

[17] Nasir Badu, "Demokrasi dan Amerika Serikat",*The Politics Journal* Vol 1, No 1 (January 2015) 14.

[18] Council of Foreign Relations, *"US Relations With China 1949-2020"*, diakses Februari 2020, https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china.

[19] Jaw-Ling Joanne, *United States-China Normalization An Evaluation Of Foreign Policy Decision Making*, (School of Law University Of Marylan: 1986), 15.

[20] Council of Foreign Relations, Op.Cit.

politik-militer Tiongkok. Sejak tahun 1920 PKT menggunakan cara non-militer yang bersifat persuasif yang tidak diketahui Amerika Serikat.[21] PKT dan juga PLA tidak memisahkan cara-cara militer, diplomatik dan politik. Target Tiongkok tidak sebatas komandan musuh mereka namun juga aspek-aspek pendukung seperti persenjataan, media, penasehat politik dan partai hingga menggunakan mata-mata untuk mencuri informasi rahasia.

Tiongkok berusaha untuk memajukan dan membangun *Revolution in Military Affair* (RMA) yang berhubungan dengan industri teknologi. *China's National Defense* menggungkapkan pada 2006, visi Tiongkok pada abad ke-21 untuk memproduksi RMA mendukung persenjataan Tiongkok. Faktanya, Tiongkok sukses menunjukkan perkembangan industri teknologinya dengan munculnya produk baru seperti satelit, pesawat, navigasi untuk kepentingan komunikasi dan perluasan telekomunikasi nasional Tiongkok. Prioritas Tiongkok berubah secara berkala dari mengembangkan budaya ke perkembangan inovasi teknologi.[22]

III. TINDAKAN PERETASAN DATA DAN PENIRUAN TEKNOLOGI ALUTSISTA UDARA AMERIKA SERIKAT OLEH TIONGKOK

3.1 Definisi Peretasan Data Siber dan Teknologi Militer

Dalam *Technology Perscpetive: National Cyber-Security*, Universitas Pertahanan Indonesia memaparkan keamanan siber adalah perlindungan, kebijakan keamanan, praktik, pelatihan dan teknologi untuk melindungi lingkungan siber beserta penggunanya. Aset pengguna dalam keamanan siber meliputi perangkat personil, aplikasi, layanan dan sistem komunikasi yang disimpan dalam dunia maya. Keamanan siber berupaya agar organisasi dan aset pengguna terhindar dari bocornya kerahasiaan dan terkena peretasan data. Keamanan siber internasional terdiri dari lima bidang kerja: kepastian hukum, teknis data dan tindakan prosedural, edukasi pengguna, struktur organisasi dan komunikasi terbuka terhadap ancaman kejahatan siber. Kelima aspek tersebut meliputi baik kerjasama maupun ancamannya sekaligus dalam dunia internasional.[23]

3.3 Peretasan Teknologi Alutsista Udara Amerika Serikat oleh Tiongkok

Terkait RMA Tiongkok di atas, pidato Kongres Partai Komunis Tiongkok ke-19, Xi Jinping menyatakan RMA berasal dari penggabungan *Artificial Intellegence* (AI) ke dalam sistem militer dan doktrin perang masa depan yang disebut para ilmuwan Tiongkok sebagai teknologi militer cerdas. Pengaplikasian AI diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan universitas, perusahaan swasta dan angkatan bersenjata. Pada Kongres Rakyat Nasional ke-12 pada 2015, Xi Jinping menggambarkan revolusi industri ilmiah dan revolusi teknologi Tiongkok melalui keamanan nasional dan dominasi pembangunan konsep militer.[24]

Target yang sering mendapatkan serangan siber adalah Departemen Pertahanan Amerika Serikat, NASA, Pentagon, Los Laboratorium Alamos, Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, Universitas Harvard, Institut Teknologi California, dan berbagai lembaga *think tank*, pertahanan kontraktor, instalasi militer, dan perusahaan komersial profil tinggi.[25]

3.3 Respon Pemerintahan Barack Obama Terhadap Peretasan Data dan Peniruan Teknologi

Tabel: 3.1 Strategi siber Amerika Serikat 2010-2016

[21] Ibid

[22] Arthur S. Ding, "China's Revolution in Military Affairs: An Uphill Endeavour", *Security Challenges*, vol. 4, no. 4 (Summer 2008), 82.

[23] Handrini Ardiyanti, "*Cyber-Security* dan Tantangan Pengembangannya," *Politica Vol. 5 No. 1* (Juni 2014) , 98

[24] Ibid.

[25] Jason Fritz, Op.Cit.

Tahun	Strategi
2010	Strategi Keamanan Nasional 2010 Obama.
2011	Strategi Internasional Gedung Putih 2011 untuk *Cyberspace*.
2011	Strategi Pertahanan Departemen 2011 untuk Operasi di *Cyberspace* (Departemen Pertahanan Amerika Serikat)
2015	Strategi Siber Departemen Pertahanan Amerika Serikat 2015.
2015	Strategi Keamanan Nasional 2015 (Obama 2015). Perilaku militer Amerika Serikat di dunia maya. Contoh pertama dari perilaku taktis dengan dampak strategis yang dianalisis dalam artikel ini terjadi dalam domain militer.
2016	Strategi Kebijakan *Cyberspace* Internasional Departemen Luar Negeri 2016

Sumber: Disarikan dari *Journal of Cyber Policy*[26]

IV. KEBIJAKAN DONALD TRUMP TERHADAP PENIRUAN TEKNOLOGI ALUTSISTA UDARA OLEH TIONGKOK

4.1 Respon Donald Trump Terhadap Peniruan Teknologi Alutsista oleh Tiongkok

Trump terus mengambil tindakan untuk memberhentikan peretas dan mata-mata siber. Salah satu tindakan tegas Amerika Serikat adalah kasus penangkapan mata-mata intelijen Tiongkok dan ekstradisi akibat pelanggaran serangan siber ke perusahaan Amerika Serikat. Selain itu juga terdapat kasus pencurian desain industri dan kekayaan intelektual alutsista udara seperti jet tempur F-35, pesawat angkut militer, helikopter tanpa awak hingga pembangkit listrik tenaga surya. Meski pencurian teknologi alutsista udara telah dibahas pada era Obama dan Xi Jinping, namun pertemuan antara Trump dan Xi Jinping di Argentina membahas mata-mata teknologi siber Tiongkok sebagai keluhan utama Amerika Serikat.[27]

Visi strategis perintah siber Trump yang dimaksud adalah mencapai superioritas dunia maya dengan memberantas peretas yang terus beroperasi tanpa rasa takut konsekuensi hukum dan militer. Senat Amerika Serikat mulai menyusun *National Defense Aithorization Act* (NDAA) 2019 menyusul perubahan drastic sikap Amerika Serikat di bawah Trump dengan visi mencegah ancaman siber dari peretas Tiongkok.[28]

4.2 *National Security Presidential Memoranda 13* (NSPM-13)

National Security Presidential Memorandum 13 (NSPM 13) dirilis pada September 2018 pada era Trump. Perintah eksekutif ini ditandatangai Trump bertujuan untuk memperkuat keamanan siber jaringan federal dan infrastruktur penting Amerika Serikat. Rilisnya NSPM 13 merupakan kali pertama Amerika Serikat menarasikan strategi siber dalam 15 tahun terakhir. Strategi NSPM 13[29] membahas kebijakan pemerintahan Trump akan menerapkan:

1. Mengambil langkah-langkah melindungi jaringan, sistem, fungsi dan data siber.
2. Mempromosikan kemakmuran Amerika dengan memelihara keamanan, perkembangan ekonomi

[26] Valentin Weber, "Linking cyber strategy with grand strategy: the case of the United States" *Journal of Cyber Policy* Vol 4 (Agustus 2018), 23.

[27] Forum Staf, Op.Cit.

[28] Ibid.

[29] White House, "National Security Presidential Memoranda 13" (Washingon DC: The White-House, 2018), 12.

digital dan domestik yang kuat inovasi.

3. Memelihara perdamaian dan keamanan dengan memperkuat kapabilitas Amerika dalam hubungan mitra dan sekutu untuk mencegah dan jika perlu menghukum aktor yang menggunakan kejahatan siber.
4. Memperluas pengaruh Amerika di luar negeri untuk memperluas keamanan jaringan siber terbuka dan dapat diandalkan.

V.KESIMPULAN

Bagian ini menarik kesimpulan mengenai asumsi dasar neo-realis Waltz atas sifat anarkis sistem internasional dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dibawah pemerintahan Trump. Penelitian ini membahas tentang peniruan teknologi alutsista udara Amerika Serikat yang dilakukan oleh Tiongkok beserta strategi pertahanan siber di era Trump dengan kebijakan *America First* sehingga tindakan yang diambil berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Peniruan teknologi alutsista udara ini diakibatkan oleh meningkatnya peretasan siber yang merupakan 'ancaman Tiongkok' *(China Threat)*. Sejarah dinamika hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok antara kerjasama dan konflik telah terjadi sejak lama. Normalisasi hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok yang terjadi pada 1972 sejak sempat memburuk saat pemimpin Partai Komunis Tiongkok Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok di Beijing. Namun, pada abad ke-20 perselisihan antara Amerika Serikat dan Tiongkok masuk ke dalam ranah dunia maya yaitu peniruan teknologi alutsista udara melalui peretasan siber.

DAFTAR PUSTAKA

FORUM's Staff. "Penggunaan "peniruan teknologi" Beijing mempersenjatai militernya dengan teknologi negara lain." *FORUM Indo Asia-Pasific Defense Journal* No42 (2017)..

Macdonald, Paul. "American First? Explaining Continuity and Change in Trump Foreign Policy", *Political Science Quarterly*.

Burchill, Scott dan Andrew, Linklater. *Teori-Teori Hubungan Internasional-Theories of International Relations*. Bandung: Nusamedia, 2016.

Asrudin. *Refleksi Teori Hubungan Internasional dari Tradisional ke Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Neack, Laura. *The New Foreign Policy, Power Seeking in Globalized Era*. America: Rowman and Littlefield Publisher, 2008.

Masoed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.

WIPO (World Intellectual Property Organization) Publication, *What is Intellectual Property?,* Switzerland (2018).

Sayre, Wallace. *American Government*. New York: Barners Publisher, 1966.

The Chiefs of Staff Ministry of Defense."Cyber Primer The Cyber Primer (2nd Edition) Development, Concepts and Doctrine Centre."*Laporan Kementrian*(2016).

Majid, Yar. "The Novelty of 'Cybercrime' An Assessment in Light of Routine Activity Theory."*European Journal of Criminology* No 1 (2005).

Badu, Nasir. "Demokrasi dan Amerika Serikat",*The Politics Journal* Vol 1, No 1 (January 2015).

Ding, Arthur S. "China's Revolution in Military Affairs: An Uphill Endeavour", *Security Challenges*, vol. 4, no. 4 (Summer 2008).

Ardiyanti, Handrini. "*Cyber-Security* dan Tantangan Pengembangannya," *Politica Vol. 5 No.* 1 (Juni 2014).

Weber, Valentin. “Linking cyber strategy with grand strategy: the case of the United States” *Journal of Cyber Policy* Vol 4 (2018).

White, House. “National Security Presidential Memoranda 13” (Washingon DC: The White-House, 2018).

Kagan Robert, “America First Has Won”, diakses 25 April 2020, https://www.nytimes.com/2018/09/23/opinion/trump-foreign-policy-america-first.html